



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI**

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

---

Tahun Sidang	: 2011-2012
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: <i>Terbuka</i>
Dengan	: Eselon I Kementerian Kesehatan RI
Hari/tanggal	: Selasa, 10 April 2012
Pukul	: Pukul 14.00 WIB–selesai
Acara	: Membahas program/kegiatan Perubahan RKA K/L 2012
Ketua Rapat	: Drs.H.Irgan Chairul Mahfiz, M.Si/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Udiartiningrum / Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Kehadiran	: 39 orang anggota dari 49 Anggota, 1 orang izin

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Eselon I Kementerian Kesehatan RI dibuka pukul 14.15 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

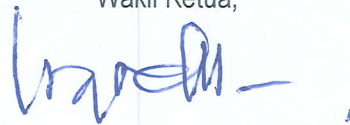
**II. KESIMPULAN**

1. Komisi IX DPR RI menyetujui alokasi APBN-Perubahan Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2012 sebesar **Rp. 3.203.000.000.000,-** (*Tiga Trilyun Dua Ratus Tiga Milyar Rupiah*).
2. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk segera melakukan penyesuaian Rencana, Kegiatan dan Program (RKP) sesuai persetujuan alokasi APBN-Perubahan Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2012, sehingga tepat sasaran dengan realisasi anggaran yang optimal, dan memperhatikan masukan anggota-anggota Komisi IX DPR RI sebagai berikut:
  - a. mengedepankan program dan kegiatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif termasuk dalam persiapan pelaksanaan BPJS.

- b. memberikan prioritas kepada pemenuhan SDM Kesehatan dan alat kesehatan di Puskesmas Kabupaten/Kota di Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).
  - c. melakukan perencanaan yang detail terhadap persiapan pelaksanaan BPJS Kesehatan, termasuk penguatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan, pemenuhan kebutuhan tempat tidur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan pemenuhan sarana kesehatan dasar.
  - d. menekankan bahwa Rencana, Kegiatan dan Program (RKP) APBN-P untuk memperkuat struktur RKP APBN Tahun Anggaran 2012.
  - e. melakukan pengawasan terhadap realisasi anggaran tahun 2012 secara terus menerus sehingga target penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan 2012 dari BPK dapat tercapai.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk segera melakukan langkah-langkah strategis dalam perencanaan pembangunan kesehatan Indonesia yang terukur, detail, implementatif dan komprehensif sehingga anggaran kesehatan 5 % (lima persen) sebagaimana amanat Pasal 171 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat terpenuhi.

**Rapat diakhiri pukul 16.30 WIB.**

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI  
Wakil Ketua,



**Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si**